

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
I. BIDANG URUSAN WAJIB	
1.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
A. PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) SMA baru mencapai 55,67 masih dibawah rata-rata Provinsi Lampung; 2. Masih tingginya persentase ruang kelas belajar SD Negeri dalam kondisi rusak ringan/sedang 70,74 persen dan rusak berat 10,69 persen; 3. Masih tingginya persentase ruang kelas belajar SMP Negeri dalam kondisi rusak ringan/sedang 81,74 persen dan rusak berat 4,06 persen; 4. Masih tingginya persentase ruang kelas belajar SMA Negeri dalam kondisi rusak ringan/sedang 41,95 persen; 5. Jumlah Guru dengan kualifikasi S1/DIV baru mencapai 78,49 persen; 6. Cakupan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan semakin luas, harus mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah. 7. Kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik belum mencukupi. 8. Terbatasnya dunia usaha dan dunia industri untuk praktek lapangan. 9. Lulusan SMK belum siap memasuki dan bersaing di pasar kerja.
B. KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya rasio ketersediaan sarana kesehatan masyarakat: Puskesmas 0,79 dan Puskesmas Pembantu 0,56; 2. Rendahnya rasio sarana kesehatan di kecamatan-kecamatan yang jumlah penduduknya banyak (<1); 3. Rasio Ketersediaan Rumah Sakit semakin menurun hanya 0,34; 4. Rasio ketersediaan tenaga medis (dokter) sangat rendah terhadap jumlah penduduk, hanya 0,22 terutama di kecamatan-kecamatan padat penduduknya seperti Air Nanningan dan Sumberrejo (0,08); 5. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanggamus sebesar 67,61 (2016) masih di bawah rata-rata Provinsi Lampung 69,94 (2016);

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Masih rendahnya cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin yaitu 4,3 persen; 7. Belum adanya Puskesmas yang terakreditasi ISO lebih disebabkan karena mahal biaya konsultan pendampingan, sertifikasi, dan audit ISO; 8. Kejadian kasus KLB tidak dapat diprediksi dan kesiapan biaya yang belum optimal serta kesiapan jejaring dan SDM yang belum memadai. 9. Masih sulitnya pemantauan terhadap terjadinya kasus malaria, karena adanya tambak udang di wilayah pantai, adanya nelayan yang keluar masuk antar pulau dan adanya migrasi penduduk antar pulau. 10. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pengawasan obat dan makanan, dan retribusi laboratorium kesehatan sehingga dalam melakukan kegiatan tersebut masih belum maksimal, karena belum adanya payung hukum
<p>C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi jalan Kabupaten Tanggamus dalam kondisi mantap hanya sekitar 41,15 persen (2017); 2. Tingginya persentase kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat, mencapai 30,22 persen (2016); 3. Kawasan kumuh di Kabupaten Tanggamus masih menyisakan sekitar 34 persen dari luas keseluruhan, sedangkan target tahun 2019 harus sudah tidak ada lagi kawasan kumuh; 4. Persentase kondisi jaringan irigasi masih rendah yaitu hanya 33,04 persen (11.463 ha) dari total kebutuhan 34.692 hektare; 5. Kurang sarana prasarana untuk kegiatan kebersihan baik meliputi kendaraan dump truck, serta personil atau tenaga operasionalnya berkurang karena beberapa orang telah diangkat PNS dan ditempatkan di unit kerja yang berbeda. Hal tersebut tidak sebanding dengan semakin luasnya area yang harus dijangkau pelayanan kebersihan, baik permukiman di kota, kecamatan maupun pasar di seluruh Kabupaten Tanggamus. 6. Dokumen-dokumen tataruang yang tidak sesuai dengan amanat RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 harus segera disusun maka perlu kesiapan dalam rangka pemenuhan dokumen tersebut. 7. Terbatasnya informasi tentang tata ruang bagi masyarakat dan swasta. 8. Terbatasnya perangkat peraturan daerah tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang
<p>D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio rumah layak huni masyarakat hingga tahun 2016 masih 60,20 persen dari 70,00 persen yang ditargetkan; 2. Masih banyak masyarakat yang menggunakan air sumur yang tidak terlindungi untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi dan mencuci yaitu 24,23 persen;

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase masyarakat yang mampu mengakses air bersih untuk kebutuhan baru 65 persen; 4. Masih cukup tinggi rumah masyarakat yang berlantai tanah yaitu 14,55 persen (2017); 5. Masih banyaknya rumah masyarakat yang berinding kayu dan bambu yaitu 38,41 persen (2017);
E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya tindakan kriminal dan gangguan keamanan di wilayah tertentu. 2. Kedewasaan/kematangan politik masyarakat relatif masih rendah. 3. Parpol belum berfungsi dengan baik. 4. Terjadinya beberapa konflik sosial di masyarakat. 5. Kurangnya dukungan data base.
F. Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya persentase angka kemiskinan 13,25 persen, meskipun di bawah rata-rata Provinsi namun masih di atas nasional; 2. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum menerima bantuan dari pemerintah. 3. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia terlantar. 4. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. 5. Adanya urbanisasi penduduk usia produktif ke kota-kota besar. 6. Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial dengan sistem panti maupun non panti. 7. Masih terbatas dan rendahnya kualitas SDM di bidang pelayanan sosial. 8. Tidak adanya tenaga pendampingan / pekerja sosial sebagai pekerja lapangan
II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Non Pelayanan Dasar	
A. Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya ketergantungan penduduk masih cukup tinggi 50,88 persen, artinya setiap 100 orang menanggung 51 orang penduduk yang tidak produktif; 2. Keterampilan tenaga kerja belum memadai 3. Kurangnya variasi dan jenis pelatihan. 4. Minimnya pegawai yang mempunyai keahlian tertentu di bidang ketenagakerjaan. 5. Sistem informasi ketenagakerjaan yang belum memadai 6. Terbatasnya lapangan kerja disektor formal
B. Pemberdayaan Perempuan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan perempuan di parlemen baru 20 persen;

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 2. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan kabupaten bila dilihat dari golongan IV/c (Pembina) dari perempuan hanya ada 1 (4%); 3. Partisipasi perempuan di berbagai bidang dan ditemukannya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga
C. Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai lembaga yang relatif baru sangat kesulitan untuk mengkondisikan pelaksanaan kegiatan secara baik, mengingat keterbatasan tempat, sarana prasarana, anggaran dan personil. 2. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penyediaan cadangan pangan dan lain-lain. 3. Masih adanya beberapa daerah rawan pangan yang perlu mendapatkan penanganan serius.
D. Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya penyediaan Prasarana dan Sarana kepentingan umum terhambat karena tingginya harga tanah yang diminta oleh warga masyarakat di atas plafon anggaran yang tersedia. 2. Negosiasi harga ganti rugi sangat sulit dan memakan waktu relatif lama
E. Lingku ngunag Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan sampah baru mencakup 68,17 persen dari jumlah sampah yang diditimbulkan masyarakat; 2. Cakupan pelayanan tempat pembuangan sampah sementara masih sangat rendah hanya 0,7 persen atau <1 per 1.000 penduduk; 3. Penangan sampah dan kebersihan perkotaan dan pasar baru mencakup 30 persen dari kebutuhan; 4. Beberapa kecamatan di Kabupaten Tanggamus merupakan wilayah rawan bencana alam: Pematang Sawa, Semaka, Kelumbayan, dan Kota Agung Timur. Sedangkan wilayah rawan Kebakaran Talang Padang, Kota Agung, dan Gisting, Wonosobo dan Kota Agung Barat;
F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan akta kelahiran masih perlu diupayakan untuk ditingkatkan, karena lemahnya kesadaran, pemahaman dan kepentingan masyarakat akan akta kelahiran dimungkinkan karena masalah geografis dan sosial ekonomi masyarakat. 2. Ada sebagian masyarakat yang sudah menikah akan tetapi tidak memiliki akta nikah, atau tidak dicatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan.
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua usulan APBD Desa memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014. 2. Masih ada 58 desa atau 20% yang masih berstatus tertinggal; 3. Lemahnya kompetensi aparatur Pekon dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan anggaran desa; 4. Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal.

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Pekon dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat; 6. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PLKB sangat kurang, idealnya 1 pekon 1 PLKB. 2. Masih ada 32 persen PUS yang belum menjadi peserta KB
I. Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Angkutan umum yang terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas angkutan. 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 3. Belum optimal dan meratanya pembangunan di seluruh wilayah baik menyangkut fisik maupun sistem manajemen transportasi yang dikembangkan 4. Masih adanya simpul-simpul transportasi yang sulit dikembangkan mengingat kondisi geografis yang tidak mendukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akhir-akhir ini menurun. 5. Prospek angkutan umum di jalan yang kurang menguntungkan dari segi perhitungan bisnis karena pergeseran alternatif moda angkutan dan maraknya jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan.
J. Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya tenaga fungsional sehingga pelayanan informasi belum optimal menjangkau seluruh wilayah pelosok pedesaan. 2. Kondisi geografis Kabupaten Tanggamus yang beberapa wilayahnya berbukit-bukit, sehingga terdapat wilayah <i>blank spot</i> (tidak terjangkau melalui media elektronik) dan daya akses informasi masyarakat yang masih cukup rendah sebagai akibat masih rendahnya kemampuan di bidang teknologi informasi. 3. SDM yang menangani Informasi dan komunikasi masih dirasakan kurang dalam penguasaan teknologi Informasi. 4. Belum optimalnya penggunaan jaringan informasi antar unit kerja. 5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi aktif masih belum optimal karena lemahnya kelembagaan koperasi dan akses pelaku usaha koperasi dalam memasuki pasar. 2. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengelola usahanya.

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keterbatasan modal pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah mengakibatkan sulitnya pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah menjalankan dan mengembangkan usahanya. 4. Lemahnya akses usaha kecil dan menengah dalam memasuki pasar. 5. Lemahnya UKM. 6. Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga.
L. Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data menunjukkan bahwa <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kab Tanggamus meningkat dari 3,93 (2012) menjadi 5,14 (2016) ini menandakan biaya produksi yang dikeluarkan meningkat sehingga kurang efisien. Kab Tanggamus yang kaya sumber daya alam namun pemanfaatannya masih kurang optimal dikarenakan investasi yang masuk. 2. Belum lengkapnya profil dan peta investasi daerah 3. Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah 4. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, ketersediaan listrik, dan belum adanya pelabuhan untuk mendukung investasi di Kabupaten Tanggamus; 5. Kurangnya kesadaran masyarakat / para pelaku usaha untuk membuat izin atas bangunan maupun izin tempat usaha yang dimiliki
M. Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana olahraga serta belum adanya gelanggang pemuda/remaja 2. Kenakalan remaja dan ancaman narkoba di kalangan pemuda. 3. Minimnya pencapaian prestasi olahraga.
N. Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) maupun antar instansi dalam proses pengumpulan data bagi perencanaan pembangunan. 2. Belum optimalnya dukungan seluruh SKPD yang terkait dengan proses pembangunan database yang valid dan akurat. 3. Ketersediaan data yang kurang akurat bagi kepentingan perencanaan pembangunan
O. Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. 2. Belum terlaksananya tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
P. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya formasi Pamong Budaya, sehingga pembinaan dan pengembangan kebudayaan hanya mengandalkan personil yang tersedia.

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
Q. Perpustakaan.	2. Belum tersedianya anggaran untuk program pelestarian benda cagar budaya 1. Keterbatasan koleksi di perpustakaan daerah. 2. Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. 3. Pelaksanaan perpustakaan keliling yang diminati masyarakat belum bisa menjangkau ke wilayah kecamatan se-Kabupaten Kabupaten Tanggamus.
R. Kearsipan	1. Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparaturnya akan pentingnya pengelolaan arsip 3. Selama ini pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip masih kurang. Arsip dipahami hanya sebatas proses surat menyurat dan selanjutnya menjadi tumpukan dokumen yang tidak berarti yang harus disingkirkan. Pemahaman yang kurang ini menjadi penyebab kurangnya kepedulian terhadap pengelolaan arsip yang terjadi pada sebagian besar SKPD. 4. Disamping itu, ketidakpedulian terhadap arsip juga dicerminkan dari anggaran SKPD yang sering luput mengalokasikan anggaran untuk sarana pendukung pengelolaan arsip. Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas arsip SKPD untuk bisa mengelola arsip instansinya secara baik karena tidak memperoleh dukungan sarana prasarana kearsipan yang memadai
III. Bidang Urusan Pemerintah Pilihan	
A. Kelautan dan Perikanan	1. Tingkat konsumsi ikan masyarakat masih di bawah standar kebutuhan yaitu 18,37 kg/kapita/tahun atau 65,6 persen dari kebutuhan minimum 28 kg/kapita/hr; 2. Faktor alam yang langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia, gelombang arus laut yang cukup besar menyebabkan sering terjadinya cuaca yang ekstrim di laut. 3. Sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik aparaturnya dan nelayan kapasitasnya masih rendah. 4. Teknologi dan system produksi : (Ketersediaan benih bermutu tinggi masih terbatas; Akses terhadap teknologi terbatas; Umumnya masih menerapkan system tradisional dan atau sistem semi-intensive). 5. Kurangnya permodalan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan. 6. Lemahnya jaminan mutu dan keamanan kualitas hasil perikanan (<i>quality assurance dan food safety</i>) : (Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas pada penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan masih kurang; Produk yang dihasilkan memenuhi penerapan HACCP, Bioterrorism Act, cemaran logam

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
	<p>berat dan histamin serta <i>certificate eco labelling</i> selain <i>health certificate</i>; Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya dalam penanganan dan pengolahan ikan).</p> <p>7. Sistem pendataan perikanan tangkap yang belum andal dan efisien dan masih parsial : (Mekanisme pengumpulan data perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih bersifat pasif (belum tepat, cepat dan efisien); Belum adanya system pengelolaan data perikanan tangkap yang terintegrasi; Terbatasnya SDM pengelola data perikanan tangkap dan perikanan budidaya; Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan data perikanan tangkap dan perikanan budidaya).</p> <p>8. Kepastian tata ruang usaha budidaya perikanan : (Terjadi konflik kepentingan dengan dengan pengguna lain; Tidak ada kepastian hukum dan dalam arti fisik dan bagi para investor perikanan budidaya).</p>
<p>B. Pariwisata</p>	<p>1. Masih rendahnya kontribusi Sektor Pariwisata (Penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu baru 1,66 persen;</p> <p>2. Pemasaran dan promosi wisata dirasa masih lemah dan terkendala tiadanya sarana promosi yang memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan teknologi baik SDM maupun perangkat/peralatannya, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas promosi.</p> <p>3. Belum tersedianya anggaran untuk menata kawasan pantai meliputi percontohan penataan kios, percontohan pengelolaan sampah, dan percontohan pengelolaan limbah.</p> <p>4. Masih terbatasnya fasilitas objek wisata yang belum memadai antara lain: areal parkir, tempat ibadah, MCK, dan kios cinderamata/cinderarasa serta terbatasnya jaringan listrik</p>
<p>C. Pertanian</p>	<p>1. Belum tercapainya target produksi padi;</p> <p>2. Isu wabah penyakit utamanya AI diantisipasi dengan pengawasan kesehatan ternak ayam secara lebih sungguh- sungguh.</p> <p>3. Tenaga medik veteriner dan dokter hewan Poskeswan/Laboratorium Kesehatan Hewan belum semua terisi.</p> <p>4. Keterbatasan keberadaan sapronak karena tergantung pabrik luar daerah.</p> <p>5. Masuknya produk asal ternak dan ternak hidup dari luar negeri mempengaruhi turunnya harga ternak lokal Kabupaten Tanggamus.</p>
<p>D. Kehutanan</p>	<p>1. Keterbatasan kewenangan dalam penanganan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus;</p> <p>2. Kemampuan teknis sumber daya manusia yang ada masih belum mencukupi untuk mengemban tanggung jawab tugas pokok dan fungsi. Peningkatan sumber daya manusia merupakan prioritas utama untuk meningkatkan kemampuan teknis personil Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan mengikutsertakan ke</p>

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
	<p>berbagai bentuk pelatihan yang ada baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kelembagaan kelompok tani sebagian besar belum mantap. Kelompok tani sebagai forum organisasi dan komunikasi petani kehutanan dan perkebunan sebagian besar perlu ditingkatkan. Keterbatasan pendidikan dan minimnya kemampuan manajemen merupakan penyebab lemahnya keberadaan kelompok tani sebagai <i>stakeholders</i> sehingga ke depan diperlukan pembinaan dan bimbingan secara intensif dan terus menerus dari petugas lapangan untuk meningkatkan kemampuannya dengan demikian diharapkan kebijakan- kebijakan Dinas dapat segera direspon dengan baik dan benar oleh kelompok tani kehutanan dan perkebunan. 4. Terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan permodalan sebagian besar petani. Sebagai pelaku utama pembangunan kemampuan, ketrampilan, dan ketersediaan modal pada petani akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan program, apabila faktor-faktor tersebut kondisinya serba terbatas sehingga akan menjadi hambatan bagi keberhasilan program tersebut. 5. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung operasional tugas dinas. Terbatasnya gedung dan ruang perkantoran serta sarana dan prasarana kantor apabila dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia dan kebutuhan operasional tugas dinas masih sangat kurang memadai. Untuk itu perlu segera tertangani agar pelaksanaan tugas Dinas bias berjalan dengan lancar.
<p>E. Energi dan Sumber Daya Mineral</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada masyarakat yang belum memiliki penerangan (PLN maupun non PLN) yaitu 2,87 persen di atas rata-rata Provinsi Lampung 0,93 persen (2017); 2. Kurangnya kesadaran dan wawasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan energi dan sumber daya mineral. 3. Masih ditemukannya kegiatan pertambangan rakyat yang belum berizin/penambangan liar. 4. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan
<p>F. Perdagangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus ke luar daerah dan nasional masih terbatas. 2. Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusah mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. 3. Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang ada sehingga belum memenuhi kriteria sebagai pasar tradisional yang bersih dan sehat. 5. Bertambahnya ritel-ritel modern di beberapa kota kecamatan berpengaruh terhadap perkembangan pasar

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
	<p>tradisional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kesadaran pedagang pasar dalam menata dagangan dan menjaga kebersihan pasar kurang terjaga, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen di pasar tradisional 7. Belum memiliki Perda tentang Retribusi Pelaksanaan Sidang Tera
G. Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB hanya 6,63 persen; 2. Pangsa pasar produk industri pengolahan daerah Kabupaten Tanggamus masih terbatas. 3. Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. 4. Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perindustrian masih rendah.
H. Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan semangat memperbaiki kehidupan ekonomi masih relatif rendah. 2. Kuota transmigran di daerah tujuan transmigrasi juga terbatas sehingga ketika secara kuantitas calon transmigran terpenuhi, belum dibarengi dengan kuota yang tersedia di daerah tujuan transmigrasi. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman dan sarana pendukung di lokasi transmigrasi.
I. Bidang Penunjang Urusan Pemerintah	
A. Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya sinergitas antar SKPD terhadap dokumen perencanaan daerah secara optimal. 2. Adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan yang telah disusun oleh daerah. 3. Belum optimalnya basis data yang dikelola oleh statistik yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.
B. Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. 2. Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendanaan pembangunan daerah. 3. Tingkat pertumbuhan belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung yang berdampak pada tingkat belanja modal; 4. Rasio Lancar Kabupaten Tanggamus menunjukkan trend penurunan dan menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik; 5. Ditetapkannya uang persediaan dalam jumlah terbatas sehingga mengakibatkan kegiatan yang direncanakan, khususnya pada awal tahun anggaran tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan time

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
	<i>schedule</i> yang telah ditetapkan.
C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja di setiap SKPD. 2. Belum optimalnya manajemen informasi sistem kepegawaian yang ada di setiap SKPD. 3. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
D. Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan. 2. Terbatasnya tenaga fungsional peneliti sebagai <i>think tank</i> dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk selanjutnya merumuskan solusi kebijakan yang akan diambil. 3. Masih kurangnya inovasi daerah yang dilakukan oleh SKPD maupun <i>stakeholders</i> lainnya dalam peningkatan pelayanan publik maupun pemerintahan.
E. Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik di daerah. 2. Masih terbatasnya sumber daya aparatur khususnya auditor dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah untuk mendukung kinerja yang optimal.
F. Isu Strategis Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus masih cukup tinggi yaitu 13,25 persen, meskipun berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung tapi masih di atas rata-rata nasional 10,12 persen; 2. Secara geografis Kabupaten Tanggamus berada di Wilayah Bagian Barat Provinsi Lampung yang dalam strategi kluster pembangunan regional diproyeksikan sebagai wilayah yang berorientasi pada pengembangan dan pembangunan pariwisata, namun dalam implementasinya antara Pemkab dan Pemprov belum terjadi koordinasi dan sinergisitas yang terpadu; 3. Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dalam kondisi mantap hanya 41,14 persen sehingga menghambat arus dan mobilisasi orang dan barang sehingga memperlambat percepatan pembangunan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dan desa; 4. Tingginya persentase kerusakan prasarana pendidikan dasar (SDN 70,74 % rusak sedang & 10,69% rusak berat; SMPN rusak sedang 81,75% dan 4,06% rusak berat; SMAN rusak sedang 41,95%) yang akan berakibat pada keterbatasan daya tampung dan berkurangnya kualitas proses pembelajaran

BIDANG/URUSAN	PERMASALAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Rendahnya rasio ketersediaan prasarana kesehatan dasar masyarakat (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu < 1) per satuan penduduk 6. Masih ada 58 Pekon (desa) yang berstatus tertinggal karena berbagai faktor: infrastruktur, ekonomi, dan sosial; 7. Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari lima daerah di Provinsi Lampung yang masuk dalam Wilayah Pengembangan dan Pembangunan Industri (WPPI) sebagaimana disebutkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dengan masuknya rencana pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM). Namun realisasi dan perkembangannya belum sesuai yang diharapkan; 8. Wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki potensi bencana yang cukup besar, seperti: Longsor, Gempa Bumi, Tsunami; Banjir, dan Kebakaran; 9. Belum terintegrasinya kebijakan dan implementasi pengembangan sektor-sektor unggulan Kabupaten Tanggamus untuk lebih berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. 10. Lemahnya SDM Aparatur Pekon dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan pekon yang akan menjadi sentral pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Tanggamus

Menindaklanjuti isu- isu strategis di atas, pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus masih cukup tinggi yaitu 13,25 persen, meskipun berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung tapi masih di atas rata-rata nasional 10,12 persen 	<p>Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Secara geografis Kabupaten Tanggamus berada di Wilayah Bagian Barat Provinsi Lampung yang dalam strategi kluster pembangunan regional diproyeksikan sebagai wilayah yang berorientasi pada pengembangan dan pembangunan pariwisata, namun dalam implementasinya antara Pemkab dan Pemprov belum terjadi koordinasi dan sinergisitas yang terpadu 	<p>Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar wilayah yang berdekatan (Pesisir Barat, Pesawaran, dan Bandar Lampung) dengan Pemerintah Provinsi Lampung</p>
<ol style="list-style-type: none"> 3. Keterbatasan infrastruktur terutama jalan dalam kondisi mantap hanya 41,14 persen sehingga menghambat arus dan mobilisasi orang dan barang sehingga memperlambat 	<p>Peningkatan Pembangunan Prasarana dasar wilayah</p>

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
percepatan pembangunan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dan desa	
4. Tingginya persentase kerusakan prasarana pendidikan dasar (SDN 70,74 % rusak sedang & 10,69% rusak berat; SMPN rusak sedang 81,75% dan 4,06% rusak berat; SMAN rusak sedang 41,95%) yang akan berakibat pada keterbatasan daya tampung dan berkurangnya kualitas proses pembelajaran	Peningkatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dasar
5. Rendahnya rasio ketersediaan prasarana kesehatan dasar masyarakat (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu < 1) per satuan penduduk	Peningkatan Pembangunan Prasarana Kesehatan Dasar
6. Masih ada 58 Pekon (desa) yang berstatus tertinggal karena berbagai faktor: infrastruktur, ekonomi, dan sosial	Pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan pemanfaatan dana desa dan pembangunan prasarana wilayah
7. Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari lima daerah di Provinsi Lampung yang masuk dalam Wilayah Pengembangan dan Pembangunan Industri (WPPI) sebagaimana disebutkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dengan masuknya rencana pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM). Namun realisasi dan perkembangannya belum sesuai yang diharapkan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perindustrian
8. Wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki potensi bencana yang cukup besar, seperti: Longsor, Gempa Bumi, Tsunami; Banjir, dan Kebakaran	Peningkatan mitigasi bencana
9. Belum terintegrasinya kebijakan dan implementasi pengembangan sektor-sektor unggulan Kabupaten Tanggamus untuk lebih berdaya saing di tingkat regional maupun nasional	Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
10. Lemahnya SDM Aparatur Pekon dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan pekon yang akan menjadi sentral pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Tanggamus	Peningkatan kapasitas SDM aparatur pekon